

**SUSTAINABLE DEVELOPMENT KAWASAN LEMBAH HARAU MENUJU
GEOPARK NASIONAL****Aura Nafisah^{1(a)}, Sujianto^{2(b)}, Hasim As'ari^{3(c)}**^{1,2,3}Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Riau^{a)}auranafisah242@gmail.com, ^{b)}sujianto@lecturer.unri.ac.id,^{b)}hasimasari@lecturer.unri.ac.id**INFORMASI
ARTIKEL****Article History:**

Dikirim:

11-06-2026

Diterbitkan Online:

30-09-2026

Kata Kunci:Pembangunan Berkelanjutan,
Geopark Nasional, Lembah
Harau, *Triple Bottom Line***ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam pengembangan Kawasan Lembah Harau menuju Geopark Nasional serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Penelitian menggunakan metode kualitatif jenis studi kasus dengan pendekatan deskriptif. Informan berjumlah sembilan orang dari unsur dinas pariwisata, dinas lingkungan hidup, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pemerintah nagari dan lembaga adat, serta pelaku usaha wisata. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña dengan kerangka *Triple Bottom Line*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembangunan berkelanjutan belum optimal. Pada dimensi lingkungan (*planet*), terdapat permasalahan pengelolaan sampah di zona inti, pembangunan homestay yang tidak sepenuhnya sesuai daya dukung lingkungan di zona penyangga, serta meningkatnya tekanan aktivitas wisata. Pada dimensi sosial (*people*), partisipasi masyarakat cukup baik, tetapi literasi Geopark masih rendah dan wisata replika di zona pemanfaatan masyarakat mengancam autentisitas budaya lokal. Pada dimensi ekonomi (*profit*), pariwisata memberikan dampak ekonomi melalui UMKM, homestay, dan jasa wisata, meskipun belum merata. Kendala utama meliputi stagnasi birokrasi dan tumpang tindih kewenangan, lemahnya regulasi tata ruang, lemahnya komitmen politik dan dukungan anggaran, serta krisis pengelolaan sampah yang disertai distorsi budaya lokal. Diperlukan penguatan tata kelola kolaboratif dan edukasi Geopark untuk mendukung keberlanjutan kawasan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of sustainable development in the Harau Valley Area toward National Geopark status and to identify the challenges encountered. A qualitative case study with a descriptive approach was employed. Nine informants were drawn from the tourism office, the environmental agency, the Natural Resources Conservation Agency (BKSDA), the Tourism Awareness Group (Pokdarwis), the nagari government and customary institutions, and tourism business actors. Data were collected through interviews, observation, and documentation and were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña model within the Triple Bottom Line framework. The findings reveal that sustainable development has not yet been implemented optimally. In the environmental dimension (planet), waste management problems occur in the core zone, homestay development in the buffer zone does not fully comply with environmental carrying capacity, and tourism pressure is increasing. In the social dimension (people), community participation is relatively strong, but Geopark literacy remains low and replica-based tourism in the community utilization zone threatens local cultural authenticity. In the economic dimension (profit), tourism contributes to local income through MSMEs, homestays, and tourism services, although the benefits are unevenly distributed. The main challenges are bureaucratic stagnation and overlapping authority, weak spatial

Keywords:Sustainable Development,
National Geopark, Harau
Valley, *Triple Bottom Line***Corresponding Author:**

auranafisah242@gmail.com

planning regulations, weak political commitment and budget support, and a waste management crisis accompanied by cultural distortion. Strengthening collaborative governance and Geopark education is essential for sustainable development.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v5i3.410>

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan konsep pembangunan yang bertujuan memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Konsep ini menekankan keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam setiap proses pembangunan. Menurut World Commission on Environment and Development (WCED, 1987), pembangunan berkelanjutan menjadi paradigma penting dalam menghadapi degradasi lingkungan, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, serta ketimpangan sosial akibat aktivitas pembangunan.

Dalam pembangunan wilayah, khususnya sektor pariwisata, konsep pembangunan berkelanjutan semakin relevan karena aktivitas pariwisata berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam, interaksi sosial masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi lokal (Fandeli, 2014; Yoeti, 2016). Oleh karena itu, pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan sosial budaya masyarakat setempat.

Pendekatan ini sangat penting dalam pengembangan kawasan Geopark karena Geopark tidak hanya berfungsi sebagai kawasan wisata, tetapi juga sebagai kawasan konservasi geologi, edukasi kebumiharian, dan pemberdayaan masyarakat lokal. UNESCO (2021) menegaskan bahwa Geopark harus mengintegrasikan tiga unsur utama, yaitu perlindungan warisan geologi, edukasi, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis masyarakat. Kawasan Lembah Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang memiliki kekayaan geologi berupa tebing terjal dan air terjun alami, serta keanekaragaman hayati dan budaya lokal Minangkabau. Potensi ini menjadikan Lembah

Harau sebagai salah satu kawasan strategis yang diusulkan menjadi Geopark Nasional.

Dalam pengelolaan Geopark, kawasan Lembah Harau secara konseptual telah direncanakan berdasarkan pembagian zona, yaitu zona inti, zona penyangga, dan zona pemanfaatan masyarakat. Zona inti merupakan kawasan dengan nilai geologi tinggi yang harus dilindungi. Zona penyangga berfungsi sebagai area transisi yang mengendalikan aktivitas pembangunan agar tidak merusak zona inti. Sementara itu, zona pemanfaatan masyarakat merupakan area yang dapat dikembangkan untuk aktivitas ekonomi, pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Penataan ruang kawasan secara fungsional mutlak diperlukan untuk meredam konflik kepentingan antara konservasi warisan geologi dan pemanfaatan komersial (McKeever & Zouros, 2005). Secara regulatif, pembagian kawasan ini umumnya terstruktur mulai dari area warisan geologi yang dilindungi secara ketat hingga wilayah penyangga dan pemanfaatan (Kementerian ESDM, 2021).

Pembagian zona ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti pengelolaan sampah di zona inti, pembangunan homestay di zona penyangga yang belum sesuai tata ruang, serta berkembangnya wisata replika di zona pemanfaatan masyarakat yang berpotensi menggeser identitas budaya lokal. Pengembangan kawasan menuju Geopark Nasional juga menghadapi tantangan berupa lemahnya koordinasi kelembagaan, rendahnya literasi Geopark masyarakat, dan belum optimalnya regulasi tata ruang. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan di Kawasan Lembah Harau memerlukan kajian yang lebih mendalam.

Studi terdahulu tentang pariwisata Harau (Putra et al., 2022) serta berbagai riset geologi tentang karakteristik Formasi Brani di Sumatera Barat umumnya berfokus pada potensi fisik dan

daya tarik lanskap. Penelitian yang secara komprehensif membedah akar permasalahan tata kelola melalui evaluasi spasial berbasis zonasi Geopark masih sangat terbatas. Kesenjangan penelitian (*research gap*) inilah yang hendak diisi melalui penelitian ini. Untuk itu, penelitian ini menggunakan kerangka *Triple Bottom Line* (Elkington, 1997) yang menilai keberlanjutan melalui dimensi lingkungan (*planet*), sosial (*people*), dan ekonomi (*profit*). Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan pembangunan berkelanjutan dalam pengembangan Kawasan Lembah Harau menuju Geopark Nasional serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis studi kasus dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam dinamika pembangunan berkelanjutan serta tantangan pengembangan Kawasan Lembah Harau menuju Geopark Nasional sejak diluncurkannya dokumen *master plan* pada Juni 2022. Informan ditentukan secara *purposive* untuk menjangkau informasi yang kredibel dan mendalam dari pihak-pihak yang berkompeten. Informan berjumlah sembilan orang yang terdiri atas unsur Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (2 orang), Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DLHPKP) (1 orang), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat (1 orang), Pokdarwis (1 orang), pemerintah nagari dan lembaga adat (2 orang), serta pelaku usaha/UMKM (2 orang).

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles et al. (2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber dan teknik. Melalui desain ini, peneliti mendeskripsikan secara sistematis dan faktual berbagai persoalan di lapangan, mulai dari tumpang tindih legalitas izin komersial di zona inti hingga hambatan koordinasi vertikal antara BKSDA Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dari perspektif kebijakan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dianalisis menggunakan kerangka *Triple Bottom Line* yang mencakup dimensi lingkungan (*planet*), sosial (*people*), dan ekonomi (*profit*) (Elkington, 1997). Secara metodologis, pembagian zonasi kawasan Geopark (zona inti, zona penyangga, dan zona pemanfaatan masyarakat) diposisikan sebagai unit analisis spasial, sedangkan kerangka *Triple Bottom Line* menjadi instrumen evaluasi substantif untuk menilai indikator keberlanjutan di setiap zona. Penggabungan kedua pendekatan ini digunakan untuk melihat secara komprehensif bagaimana prinsip pembangunan berkelanjutan diterapkan di Kawasan Lembah Harau menuju Geopark Nasional.

Dimensi Lingkungan (*Planet*)

Dimensi lingkungan merupakan indikator utama dalam pengembangan kawasan Geopark karena keberhasilan Geopark sangat bergantung pada kemampuan kawasan menjaga kelestarian warisan geologi, keanekaragaman hayati, dan kualitas lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kawasan Lembah Harau memiliki potensi lingkungan yang sangat besar, berupa bentang alam tebing terjal setinggi 200–500 meter, air terjun alami, kawasan hutan lindung, serta berbagai jenis flora dan fauna yang menjadi daya tarik wisata (Gambar 1).



Gambar 1. Kondisi Tebing Lembah Harau sebagai Geosite Utama

Sumber: Dokumentasi peneliti (2026)

Hasil observasi menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan pengelola kawasan telah melakukan beberapa upaya konservasi, seperti perlindungan kawasan hutan, pembatasan aktivitas tertentu di area konservasi, dan pengembangan wisata berbasis alam. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen menjaga kelestarian lingkungan sebagai modal utama pengembangan Geopark.

Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan masih

menghadapi berbagai permasalahan. Berdasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 112 Tahun 2019 tentang Penetapan Delineasi Geopark Harau, kawasan ini memiliki batas dan aturan zonasi yang jelas. Akan tetapi, implementasinya di lapangan terkendala dualisme kewenangan antara BKSDA Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Resor Wilayah 3 Lembah Harau, Bapak Martias:

“... Jadi kalau bangunan yang masif itu sebetulnya bukan di kawasan kita ... homestay nih berdiri di mana-mana nggak terkontrol lagi, tapi bukan di kawasan konservasi, di miliknya masyarakat-masyarakat umum yang berbatasan dengan kawasan konservasi. Pemda 50 Kota juga mendukung itu, tapi tetap yang dipikirkan uang masuk di tiket saja”.

Sikap permisif birokrasi dalam mengejar target pendapatan daerah juga diakui secara terbuka oleh mantan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora), Bapak Syukrianda:

“... Destinasi wisata buatan ini memang berdampak untuk geopark juga ... Ini harus diakui bentuk permissifnya dan bentuk kelalaian juga bagi daerah dalam proses perizinan, bersifat terlalu mudah memberikan izin”.

Di zona inti, ditemukan permasalahan pengelolaan sampah yang cukup serius akibat meningkatnya jumlah wisatawan, terutama pada musim liburan. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, sebagaimana dikonfirmasi oleh Penyuluh Lingkungan Hidup DLHPKP, Bapak Rifyal Djusdal:

“... Kalau sekarang pengelolaan sampah sistemnya masih kumpul, angkut, buang ... PAD yang didapatkan hanya 150 juta untuk seluruh IKK ... sedangkan operasional 1,3 miliar dikarenakan masyarakat malas atau enggan untuk bayar sampah. Armada hanya bisa melayani seminggu sekali untuk pengangkutan sampah”.



Gambar 2. Akumulasi Limbah Domestik di Aliran Sungai Kawasan Sarasah Bunta

Sumber: Dokumentasi peneliti (2026)

Selain itu, masih ditemukan pembangunan wisata buatan dan fasilitas pendukung yang belum sepenuhnya memperhatikan daya dukung lingkungan dan berpotensi mengurangi keaslian bentang alam yang menjadi karakteristik utama Lembah Harau. Jika kondisi ini berlanjut, pencapaian standar kawasan Geopark yang menekankan prinsip konservasi dapat terhambat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan wisata belum diimbangi dengan sistem pengelolaan lingkungan yang memadai.

Di zona penyangga, ditemukan pembangunan homestay dan infrastruktur wisata yang belum sepenuhnya memperhatikan daya dukung lingkungan. Berdasarkan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lima Puluh Kota, zona penyangga dan area sekitar tebing seharusnya bebas dari bangunan masif permanen. Namun, temuan lapangan menunjukkan adanya intrusi visual akibat pelanggaran tata ruang tersebut (Gambar 3).



Gambar 3. Pembangunan Kafe dan Homestay di Kaki Tebing Zona Inti
Sumber: Dokumentasi peneliti (2026)

Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan krisis pengelolaan sampah tersebut berpotensi mengganggu integritas kawasan Geopark. Temuan ini sejalan dengan pandangan Costanza dan Daly (1992) bahwa pembangunan berkelanjutan harus menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan generasi mendatang.

Dimensi Sosial (People)

Dimensi sosial dalam pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, pelestarian budaya, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Lembah Harau cukup aktif terlibat dalam pengembangan sektor pariwisata. Partisipasi tersebut terlihat melalui keberadaan Pokdarwis, pemerintah nagari, lembaga adat, dan pelaku usaha wisata yang turut mendukung pengelolaan kawasan. Sistem kepemimpinan tradisional Minangkabau *tigo tungku sajarangan (niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai)* memiliki posisi strategis dalam menjaga tanah ulayat dari eksploitasi investor luar.

Meskipun demikian, keterlibatan masyarakat dan tokoh adat dalam perencanaan kebijakan sejauh ini masih bersifat formalitas satu arah (sosialisasi), belum berupa perumusan bersama. Diseminasi tiga Surat Keputusan Bupati tentang Geopark Harau tahun 2019 belum efektif menjangkau akar rumput. Akibatnya, masyarakat menilai Geopark tidak memberikan dampak ekonomi langsung, sebagaimana diungkapkan Bapak Martias:

“... Masyarakat juga belum paham apa sih Geopark, untuk apa sih Geopark, fungsinya seperti apa, karena secara kasatmata

mereka merasa gak ada untung ruginya hanya dengan status geopark”.

Lemahnya partisipasi ini diperparah oleh ketiadaan alokasi anggaran (*zero budget*) untuk pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kepala Disparpora, Bapak Elsiwa Fajri:

“... Pelatihan untuk Pokdarwis 2026 kosong, 2025 kosong. Berharap Pokdarwis secara mandiri melakukan pengembangan diri”.

Selain persoalan partisipasi, tingkat literasi Geopark masyarakat dan pengunjung masih relatif rendah. Kurangnya kegiatan edukasi, ketiadaan papan interpretasi, dan minimnya pusat informasi Geopark menyebabkan pemahaman tentang konservasi belum berkembang optimal, sebagaimana dijelaskan oleh pengelola wisata, Bapak Sukri:

“... Dulu sempat ada penangkaran kupu-kupu, tetapi sekarang ini sudah tidak terjaga dan sudah rusak. Untuk narasi edukasi yang disajikan kepada wisatawan belum ada khusus ... belajar otodidak ... Untuk saat ini melalui media sosial.”.

Keterbatasan fasilitas edukasi tersebut diperparah oleh fenomena wisata replika yang mengadopsi konsep luar negeri. Kehadiran miniatur bangunan asing di zona pemanfaatan masyarakat tidak hanya mengaburkan identitas visual kawasan, tetapi juga memicu distorsi pengetahuan. Sekretaris Nagari, Bapak Adi Putra, bahkan menyebut fenomena ini sebagai bentuk pembodohan publik:

“... Ini bisa jadi pembodohan publik karena anak kecil akan mengira Menara Eiffel itu ada di Harau ... kalau turis ingin alam ya ke Indonesia, tapi malahan yang dibangun replikasi Menara Eiffel, Menara Pisa”.

Kritik senada disampaikan oleh *niniak mamak*, Bapak Darman:

“... Untuk pembangunan Kampung Eropa itu saya rasa itu yang jadi masalah, harus ditelusuri lagi kenapa daerah luar negeri itu yang diambil untuk menaikkan nama daerah sini, kenapa tidak tentang adat Minangkabau”.



Gambar 4. Miniatur Menara Eiffel dan Arsitektur Eropa di Tengah Lanskap Tropis Lembah Harau

Sumber: Dokumentasi peneliti (2026)

Dominasi objek wisata tiruan dan ketiadaan regulasi operasional, seperti peraturan nagari khusus, memunculkan kekhawatiran terhadap pelestarian identitas budaya Minangkabau dan falsafah *alam takambang jadi guru*. Padahal, Geopark tidak hanya berfungsi sebagai kawasan konservasi geologi, tetapi juga sebagai sarana pelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat (UNESCO, 2017). Oleh karena itu, penguatan literasi, integrasi budaya autentik, dan pelibatan aktif lembaga adat harus menjadi prioritas dalam pengembangan Kawasan Lembah Harau menuju Geopark Nasional.

Dimensi Ekonomi (Profit)

Dimensi ekonomi merupakan aspek yang manfaatnya paling terlihat dalam pengembangan pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas wisata di Kawasan Lembah Harau telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat. Peningkatan jumlah wisatawan mendorong tumbuhnya berbagai usaha, seperti homestay, rumah makan, toko souvenir, jasa transportasi wisata, penyewaan kendaraan, dan UMKM berbasis produk lokal (Gambar 5). Kondisi ini menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi sumber pendapatan penting bagi masyarakat.



Gambar 5. Produk Souvenir Lokal sebagai Bentuk Ekonomi Kreatif Masyarakat Nagari

Sumber: Dokumentasi peneliti (2026)

Selain menciptakan peluang usaha baru, perkembangan pariwisata juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Sektor swasta seperti Kampung Sarosah menyerap sebagian tenaga kerja lokal, sebagaimana dijelaskan oleh Sekretaris Manajer Kampung Sarosah, Ibu Gusweni:

“... Untuk tenaga kerja dilakukan persentase 40% warga lokal dan 60% warga Kota Payakumbuh ... Wisata tonjolannya ada pembuatan miniatur dari luar negeri untuk membantu masyarakat yang hidupnya pas-pasan karena mereka tidak bisa ke negara itu langsung”.

Meskipun demikian, distribusi manfaat ekonomi belum merata. Sebagian besar keuntungan masih dinikmati kelompok usaha yang bermodal besar. Secara administratif, dana bagi hasil dari pemerintah daerah ke nagari telah berjalan melalui skema 20% dari pendapatan retribusi yang diatur dalam peraturan bupati. Namun, mekanisme ini menimbulkan disparitas karena distribusi internal di tingkat nagari belum menjangkau aktor akar rumput secara sistematis, sebagaimana diungkapkan Bapak Adi Putra:

“... Retribusi Lembah Harau kalau dari pemda ke nagari didapatnya 20% dari satu tahun. Untuk nagari, yang 20% dibagi ke lembaga yang ada di Tarantang. Yang didapatkan Pokdarwis dari nagari tidak ada, tetapi dalam beberapa kegiatan ada yang dibiayai nagari, tapi bukan dari sistem bagi hasil”.

Di sisi lain, pelaku UMKM lokal masih kesulitan bersaing akibat minimnya standardisasi produk dan pendampingan.

Kepala Disparpora, Bapak Elsiwa Fajri, mengakui adanya kekosongan intervensi tersebut:

“... Sekarang kita harus melakukan standardisasi produk UMKM yang ada di Harau ... karena sekarang ini masih sangat tradisional, baik dari produk, packaging, market, dan belum ada intervensi dari pemerintah daerah”.

Persoalan ekonomi ini juga dibayangi ketimpangan tajam antara pendapatan retribusi dan biaya pemulihan lingkungan. Layanan kebersihan mengalami defisit anggaran yang besar, sedangkan anggaran dinas lingkungan hidup hanya 0,61% dari total PAD. Hal ini diperparah oleh tata kelola retribusi yang masih konvensional (tunai di pintu gerbang utama) sehingga rentan terhadap pungutan liar dan kebocoran anggaran, sebagaimana diakui Kepala Disparpora:

“... Sistem ticketing masih menggunakan cash dan belum menggunakan cashless ... jadi masih ada peluang untuk dilakukan pungutan atau korupsi. Jadi harapannya bisa menggunakan sistem cashless yang dirasa lebih aman”.

Berdasarkan temuan tersebut, meskipun dimensi ekonomi cukup berjalan melalui penyerapan tenaga kerja dan perputaran uang, aspek ini belum mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan. Penguatan ekonomi masyarakat berbasis pariwisata, transisi ke pembayaran nontunai (*cashless*), dan intervensi kebijakan yang berimbang diperlukan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata tanpa mengorbankan integritas lingkungan dan budaya.

Kendala Pembangunan Berkelanjutan Kawasan Lembah Harau

Hasil analisis menunjukkan bahwa transformasi Kawasan Lembah Harau menuju Geopark Nasional dan pemenuhan prinsip pembangunan berkelanjutan masih menghadapi empat hambatan fundamental.

Pertama, stagnasi birokrasi dan tumpang tindih kewenangan. Tata kelola kawasan terpecah antara otoritas konservasi pusat (BKSDA) yang bersifat protektif dan pemerintah daerah yang berorientasi pada pendapatan (*revenue-oriented*). Ketiadaan badan pengelola Geopark yang otoritatif serta minimnya integrasi visi Geopark ke dalam

dokumen perencanaan strategis daerah (RPJMD) menyebabkan koordinasi lintas sektor berjalan parsial dan tanpa arah yang jelas.

Kedua, lemahnya regulasi tata ruang dan pemanfaatan lahan. Terdapat celah hukum (*loophole*) antara RTRW daerah dan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark). Status tanah ulayat yang dapat mengurus perizinan bangunan komersial melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) memicu intrusi visual berupa struktur beton permanen di zona inti tebing. Sementara itu, sikap permisif birokrasi terhadap investasi jangka pendek dan ketiadaan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah yang efektif membuat penegakan sanksi di lapangan tidak berjalan (*unenforceable*).

Ketiga, lemahnya komitmen politik, dukungan anggaran, dan infrastruktur. Pengembangan kawasan terjebak pada paradigma *single bottom line* (berorientasi keuntungan) demi mengejar target pendapatan asli daerah (PAD) dari pariwisata massal. Hal ini memicu kesenjangan fiskal yang ekstrem dengan alokasi anggaran pemulihan lingkungan yang sangat minim. Sistem retribusi manual yang rawan pungutan liar, kemacetan parah saat musim ramai (*high season*) akibat jalan yang sempit, dan ketiadaan fasilitas literasi geologi menunjukkan bahwa pembangunan belum mempertimbangkan daya dukung (*carrying capacity*) lingkungan.

Keempat, krisis pengelolaan limbah dan distorsi budaya lokal. Pengelolaan sampah terhambat oleh sindrom NIMBY (*not in my backyard*) dan rendahnya kesadaran kolektif sehingga limbah domestik mencemari aliran sungai. Di sisi lain, maraknya wahana rekreasi bertema replika asing di zona pemanfaatan masyarakat memicu konflik visual, mengikis autentisitas lanskap, dan mendistorsi nilai kearifan lokal dalam falsafah *alam takambang jadi guru*.

PENUTUP

Pengembangan Kawasan Lembah Harau menuju Geopark Nasional belum berjalan optimal. Pada dimensi lingkungan, terdapat krisis pengelolaan sampah dan intrusi bangunan permanen yang melanggar tata ruang. Pada dimensi sosial, partisipasi masyarakat cukup baik, tetapi masih bersifat formalitas, literasi Geopark rendah, dan autentisitas budaya lokal tergerus oleh wahana wisata replika. Pada

dimensi ekonomi, pariwisata memberikan manfaat ekonomi, tetapi distribusinya belum merata dan tata kelola retribusi masih rawan kebocoran. Kondisi ini berakar pada empat kendala yang saling mengunci, yaitu stagnasi birokrasi dan dualisme kewenangan, lemahnya regulasi tata ruang dalam mengendalikan investasi, lemahnya komitmen politik dan dukungan anggaran yang membuat pengelolaan terjebak pada orientasi PAD jangka pendek (*single bottom line*), serta krisis pengelolaan sampah dan distorsi budaya lokal.

Oleh karena itu, percepatan status Geopark Nasional menuntut pergeseran paradigma tata kelola melalui pengikatan komitmen politik pimpinan daerah dalam dokumen perencanaan formal, pembentukan badan pengelola Geopark yang independen, digitalisasi sistem retribusi (*cashless*), serta pengembalian ruh edukasi berbasis falsafah *alam takambang jadi guru* demi keberlangsungan jangka panjang ekosistem dan masyarakat.

Penelitian ini terbatas pada sembilan informan dan belum melibatkan wisatawan maupun masyarakat umum di luar kelembagaan. Penelitian selanjutnya dapat melibatkan pengunjung dan warga, serta mengukur daya dukung lingkungan kawasan secara kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Costanza, R., & Daly, H. E. (1992). Natural capital and sustainable development. *Conservation Biology*, 6(1), 37–46. <https://doi.org/10.1046/j.1523-1739.1992.610037.x>
- Dowling, R. K., & Newsome, D. (2018). *Handbook of geotourism*. Edward Elgar Publishing.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Capstone Publishing.
- Fandeli, C. (2014). *Pengembangan destinasi pariwisata*. Pustaka Pelajar.
- Henriques, A., & Richardson, J. (2004). *The triple bottom line: Does it all add up?* Earthscan.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2021). *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penetapan Area Warisan Geologi (Geoheritage)*.
- McKeever, P. J., & Zouros, N. (2005). Geoparks: Celebrating Earth heritage, sustaining local communities. *Episodes*, 28(4), 274–278. <https://doi.org/10.18814/epiiugs/2005/v28i4/005>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Putra, A. D., et al. (2022). Analisis pengembangan wisata Lembah Harau. *Jurnal Pariwisata Pesona*.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark)*.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- UNESCO. (2021). *UNESCO Global Geoparks operational guidelines*. UNESCO.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. United Nations.
- World Commission on Environment and Development. (1987). *Our common future*. Oxford University Press.
- Yoeti, O. A. (2016). *Perencanaan dan pengembangan pariwisata*. Balai Pustaka.